

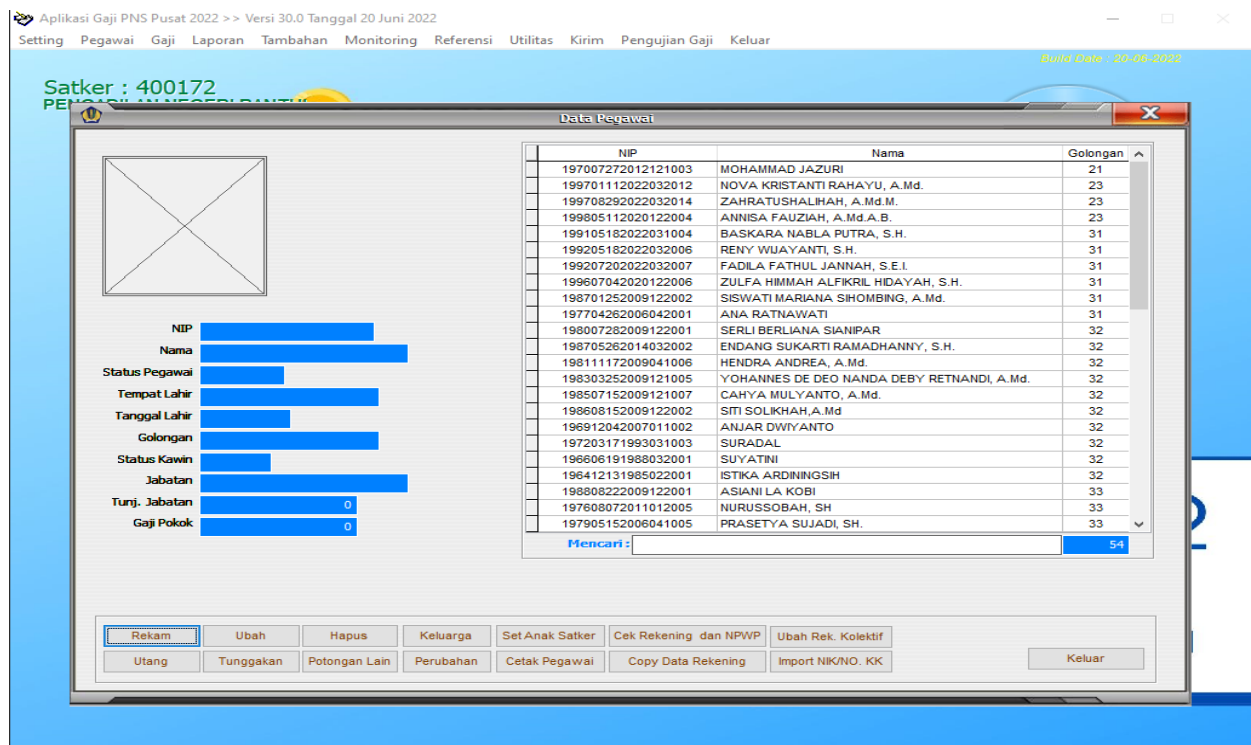
# APLIKASI PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## APLIKASI BAGIAN ADMINISTRASI

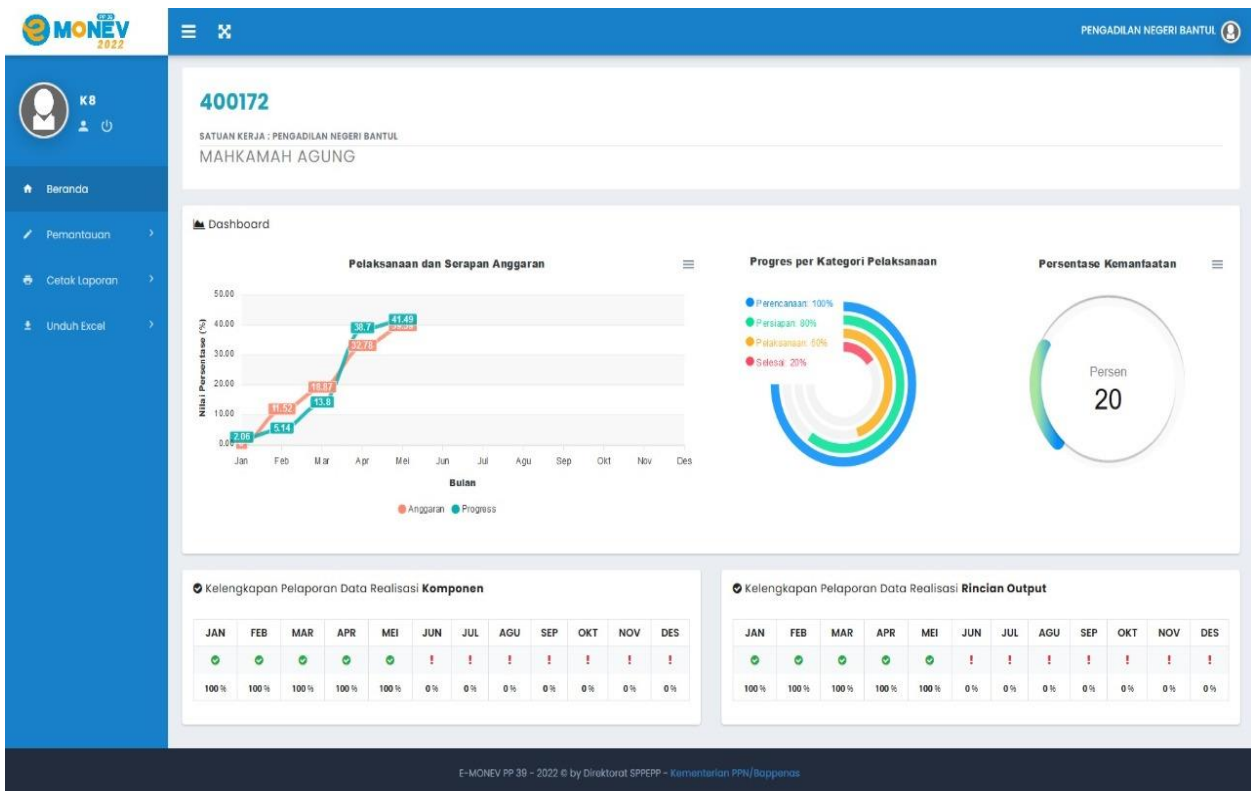
### A. Aplikasi GPP 2022



Aplikasi GPP digunakan untuk mempermudah mengelola gaji Pegawai Negeri Sipil pusat pada Satuan Kerja.

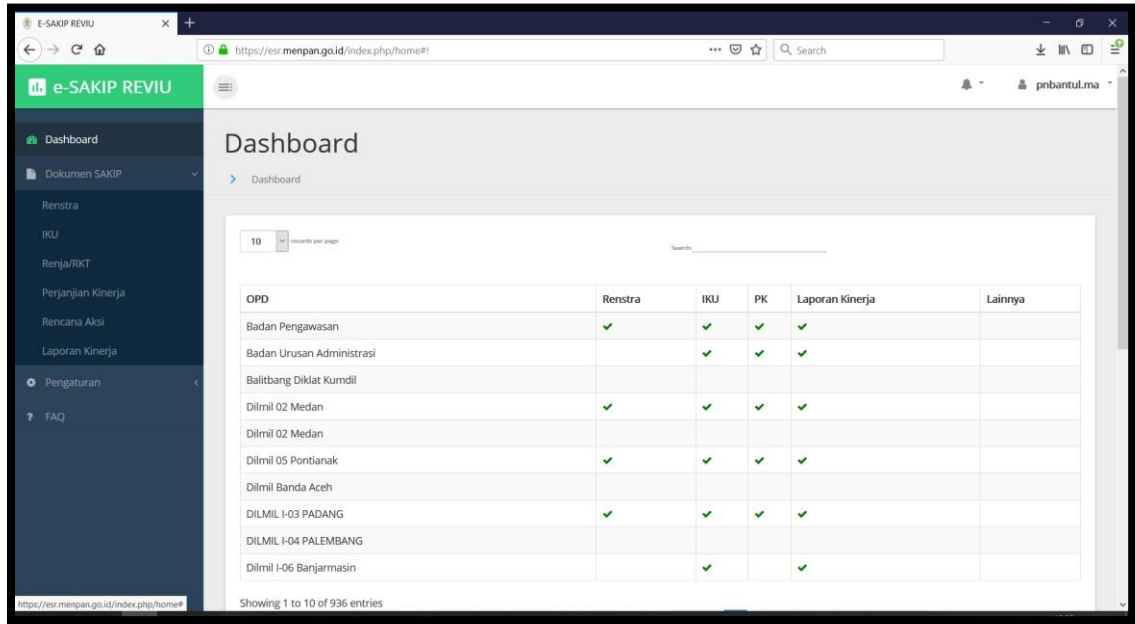


## B. Aplikasi e-Monev Bappenas



Merupakan aplikasi sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

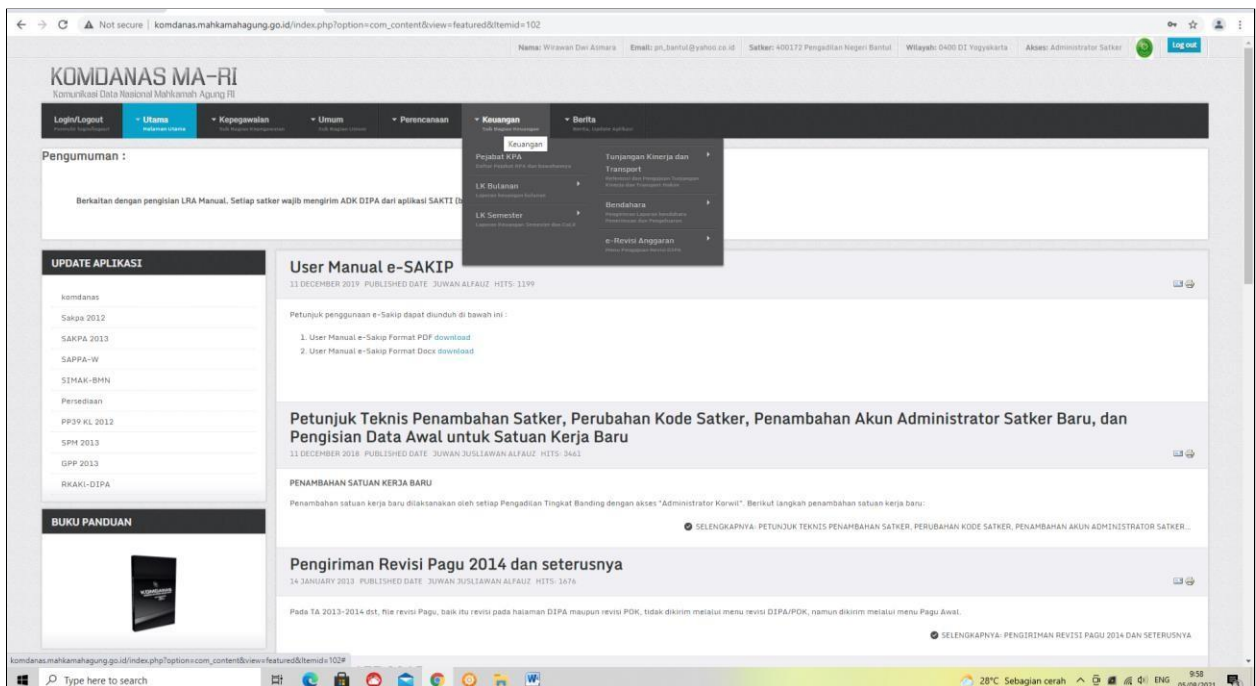
### C. Aplikasi e-SAKIP



E-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

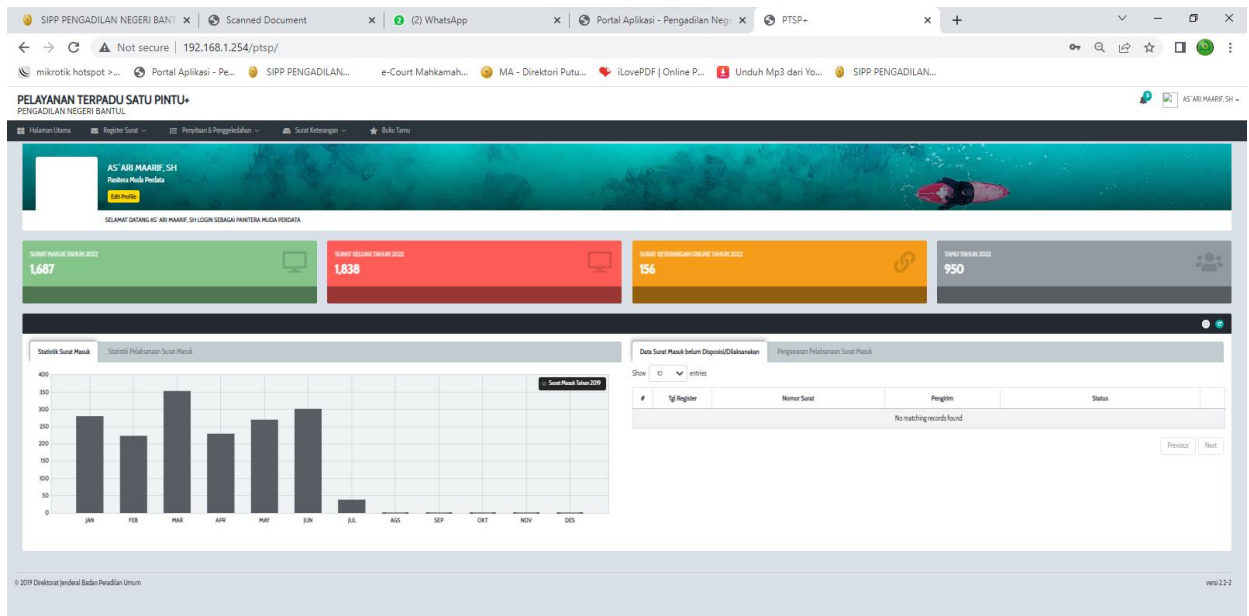
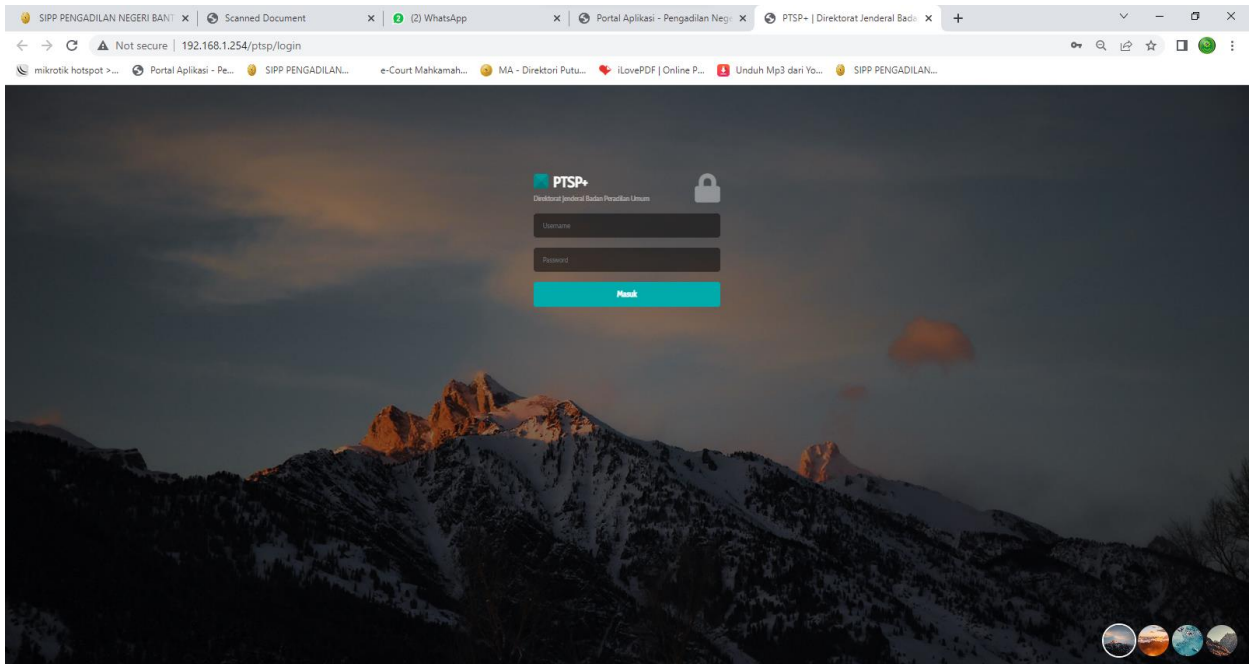
Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

### D. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Bagian Keuangan



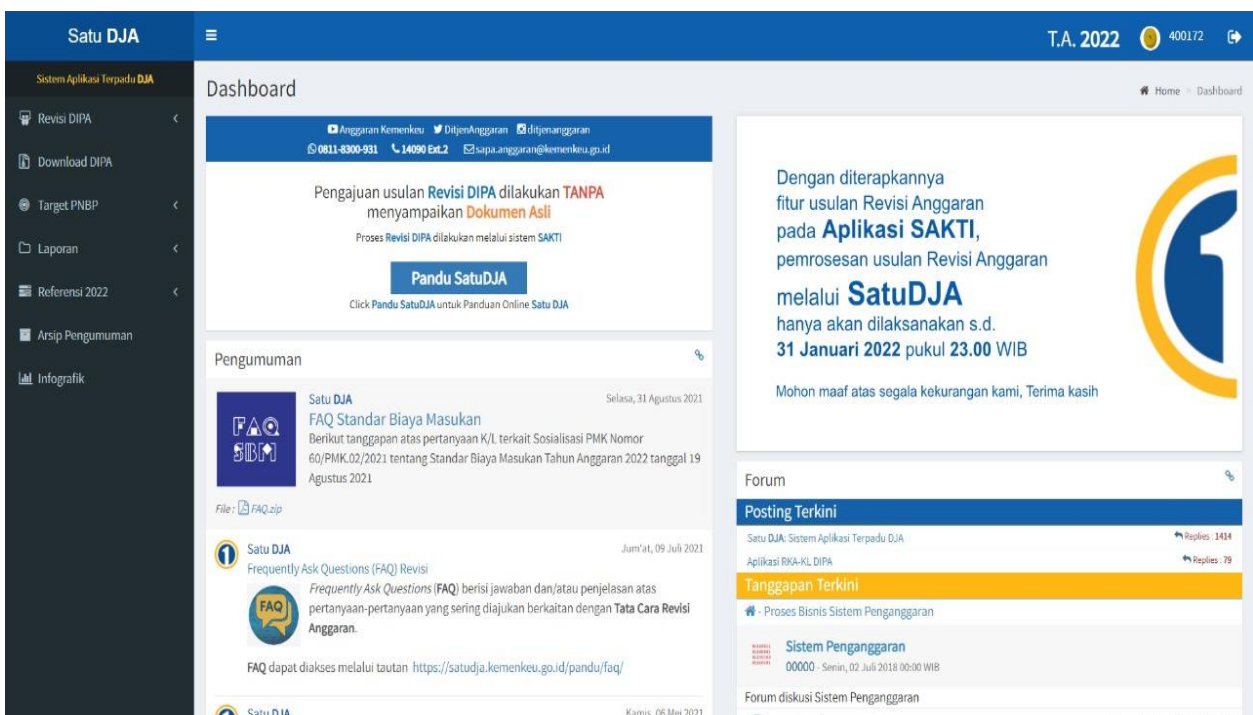
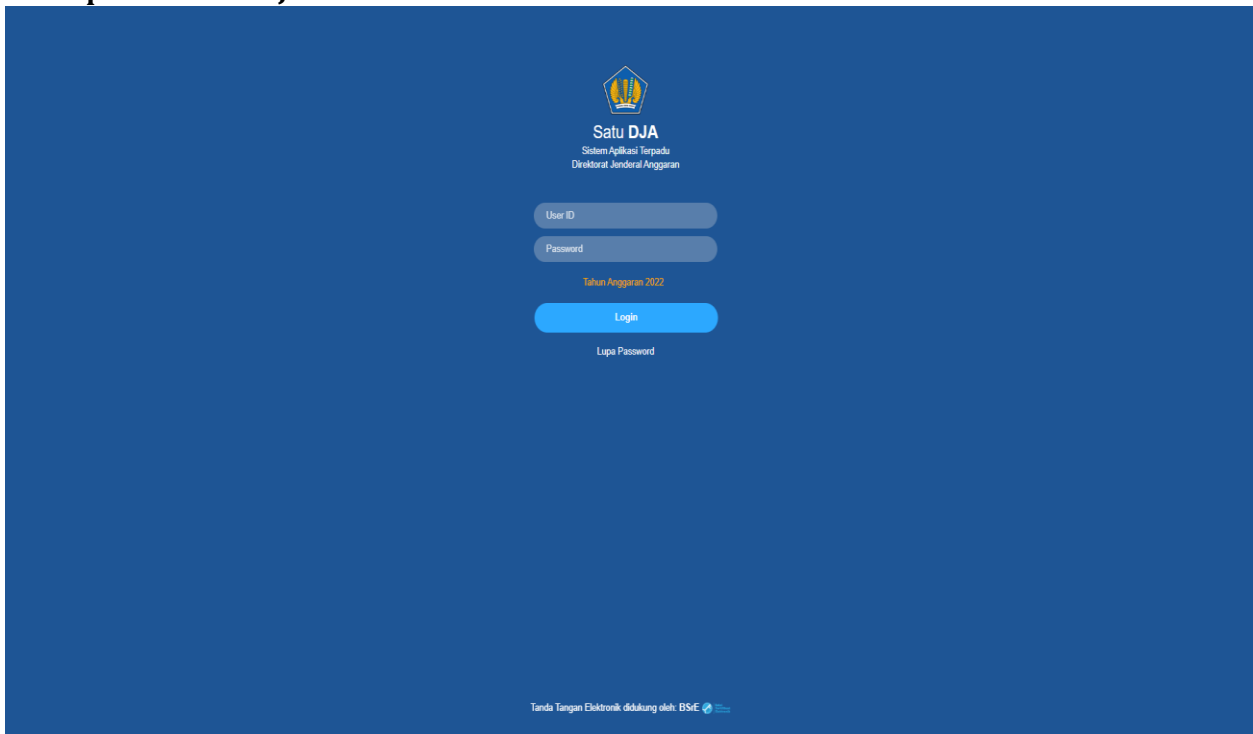
Merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi pencatatan transaksi.

## E. Aplikasi PTSP + (Khusus Persuratan)



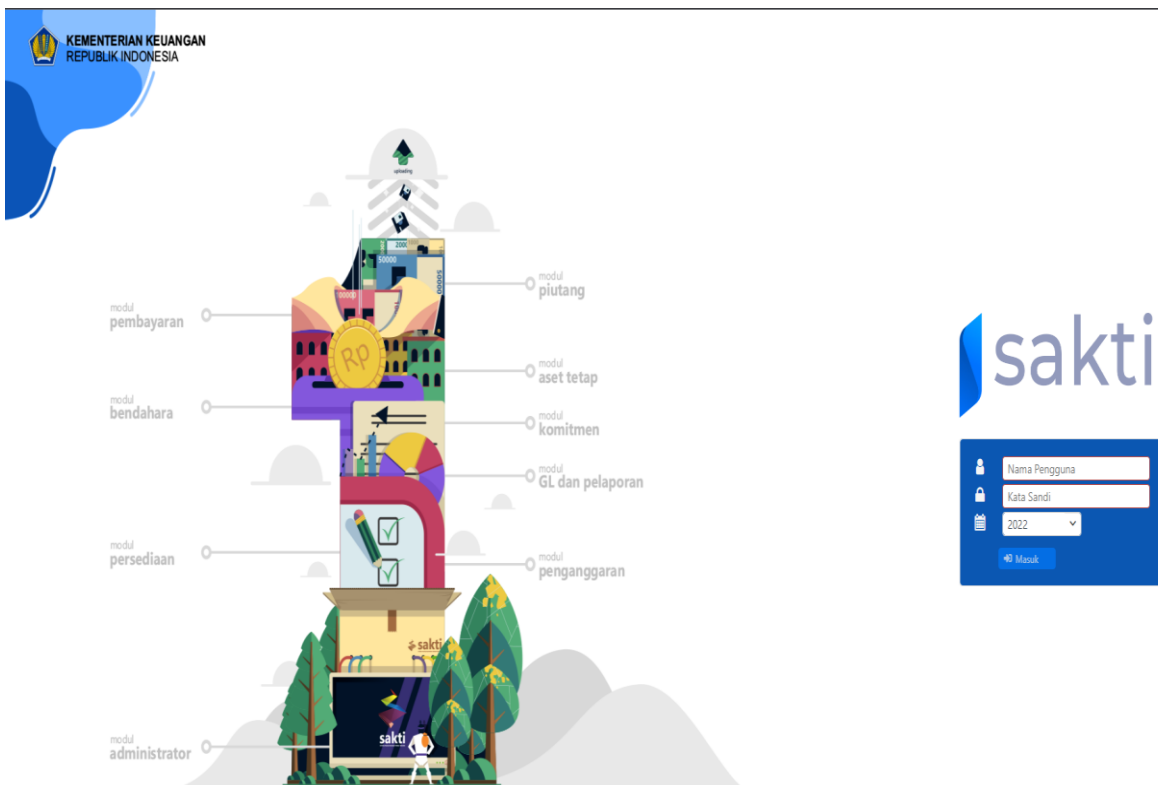
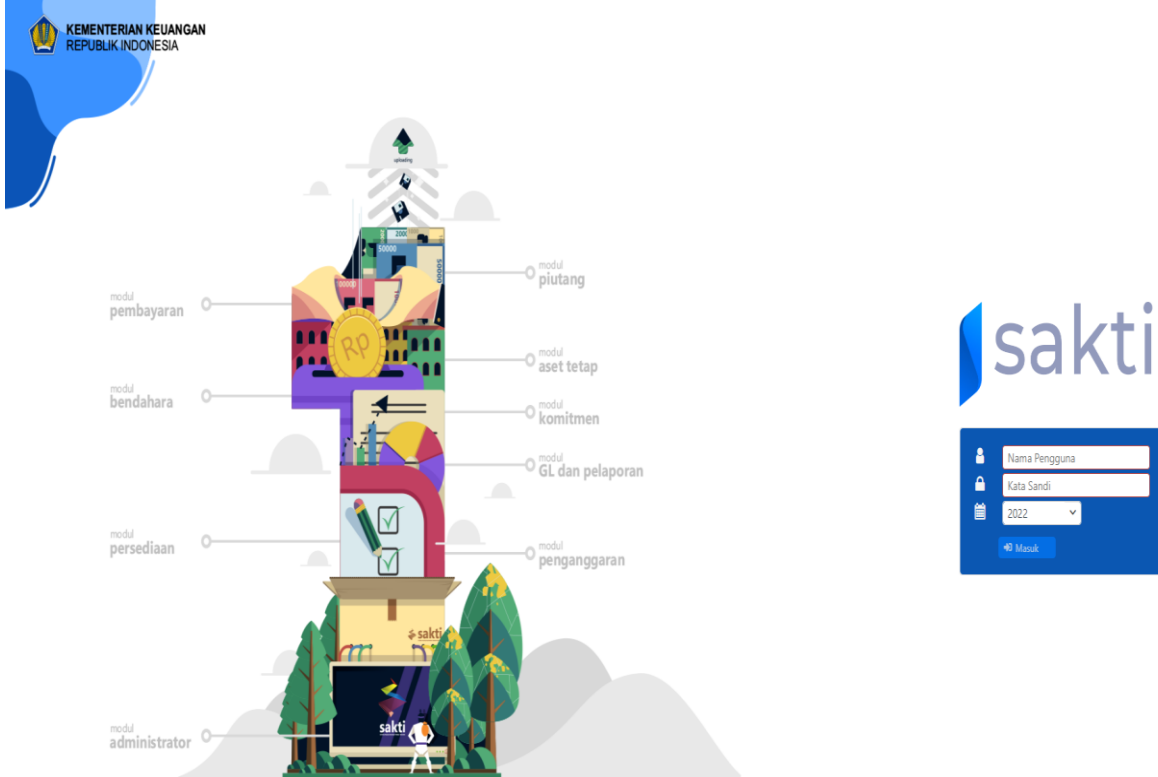
Adalah aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar.

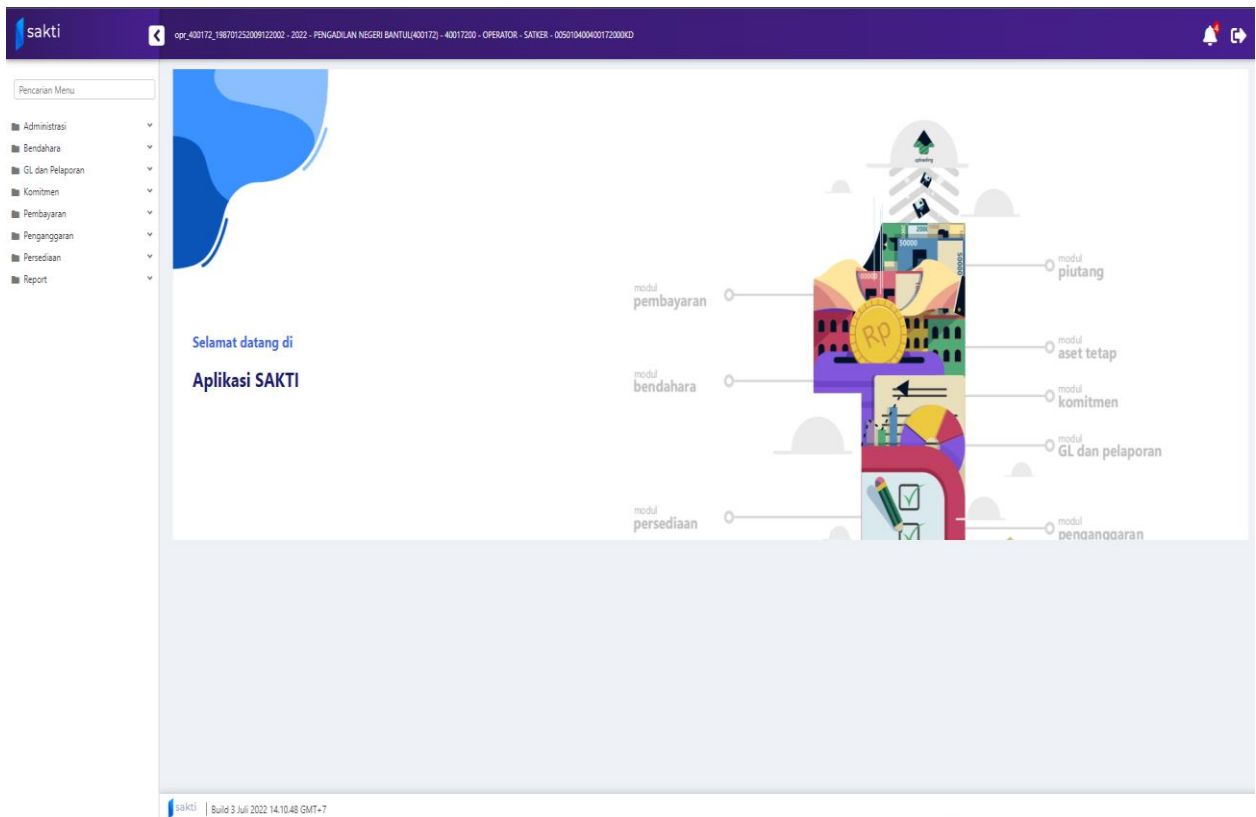
## F. Aplikasi SATUDJA



Aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian keuangan berbasis jaringan (online) untuk melakukan revisi anggaran.

## G. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)





Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

## H. Aplikasi SIMAN PERENCANAAN



NO	THN ANGGARAN	NO TIKET	TGL TIKET	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH PENGADAAN	JUMLAH PEMELIHARAAN	STATUS	TGL KIRIM SATKER	TGL KIRIM KORWIL	TG
1	2018	R1V3JC	19/09/2016	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	27	Koord. KP D30N kirim hasil telaah ke K/L	19/09/2016 00:00:00	20/09/2016 00:00:00	11/10
2	2019	RKDAT92	17/07/2017	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	28	Koord. KP D30N kirim hasil telaah ke K/L	18/07/2017 00:00:00	24/07/2017 00:00:00	09/08
3	2020	R9PK8Q9	25/07/2018	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	27	Koord. KP D30N kirim hasil telaah ke K/L	31/07/2018 00:00:00	02/08/2018 00:00:00	18/09
4	2021	RGTWTA4	01/07/2019	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	27	Dikembalikan Eselon-1 ke Korwil	01/07/2019 00:00:00		
5	2022	R3D4MS	17/06/2020	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	28	Koord. KP D30N kirim hasil telaah ke K/L	18/06/2020 00:00:00	14/07/2020 00:00:00	11/09
6	2023	RR6KVAW	14/07/2021	005010400400172000KD	PENGADILAN NEGERI BANTUL	0	28	Dikirim ke Eselon-1	19/07/2021 00:00:00	21/07/2021 00:00:00	

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna.



## I. Aplikasi SMART

**SmArt**  
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu  
Kementerian Keuangan

*Selamat datang di Aplikasi SMART. Silahkan login dengan password yang digunakan di tahun anggaran 2021. Fungsi pilih tahun anggaran ada setelah user login pada aplikasi.*

Username 

Password 

Tampilkan Password

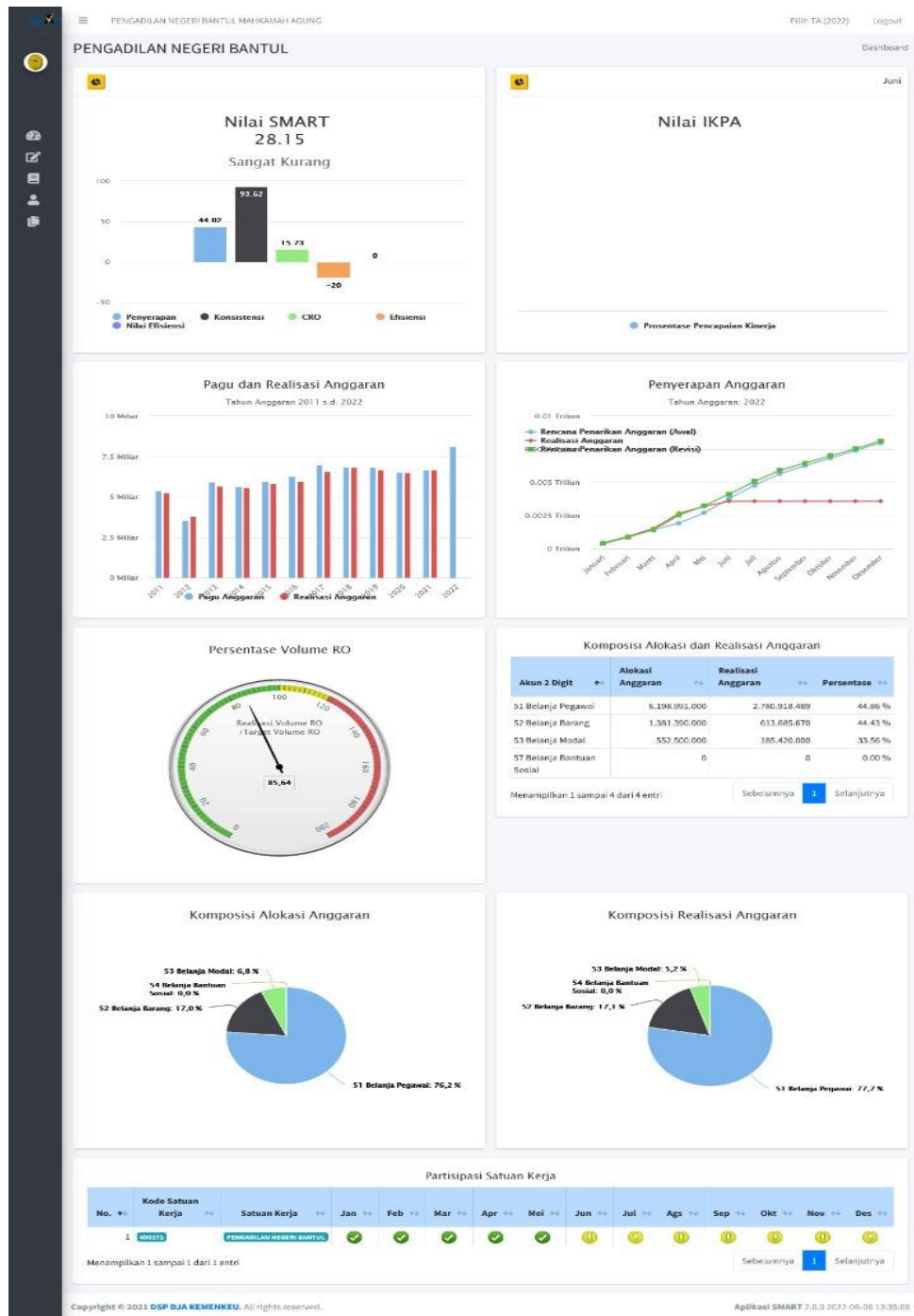
20 - 20 =

**Login**

[Reset Password melalui e-Mail](#)  
[Formulir Reset Password](#)

SAPA ANGGARAN  
WA +628118300931  
<https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

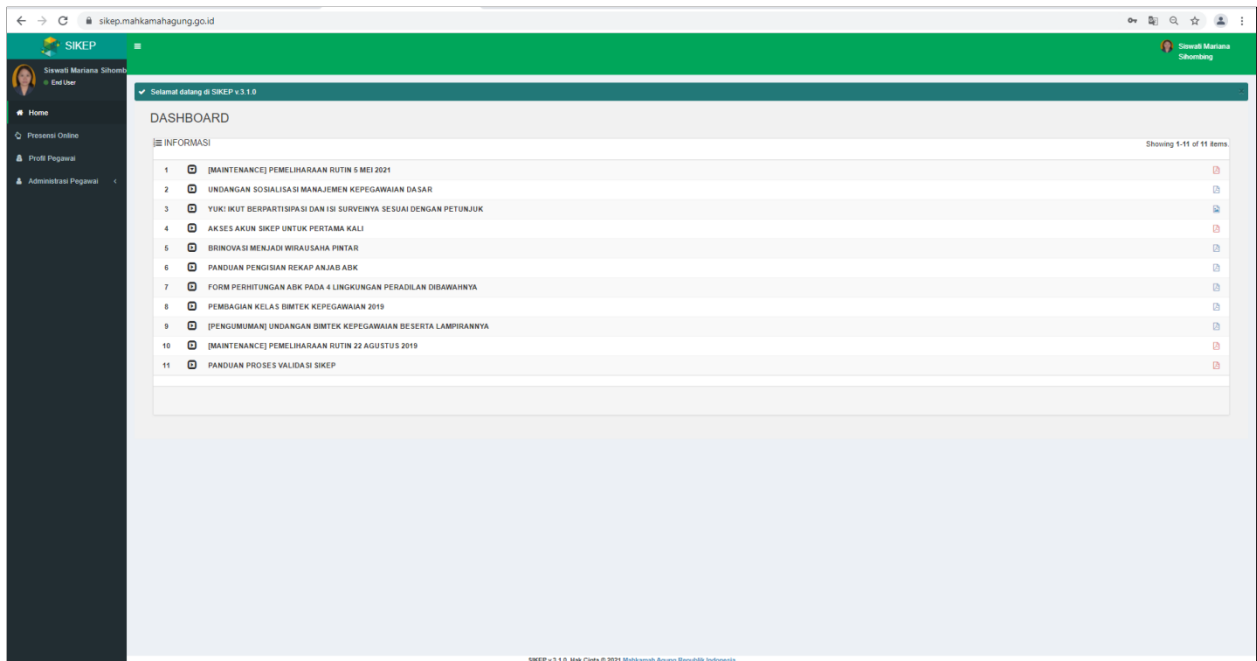
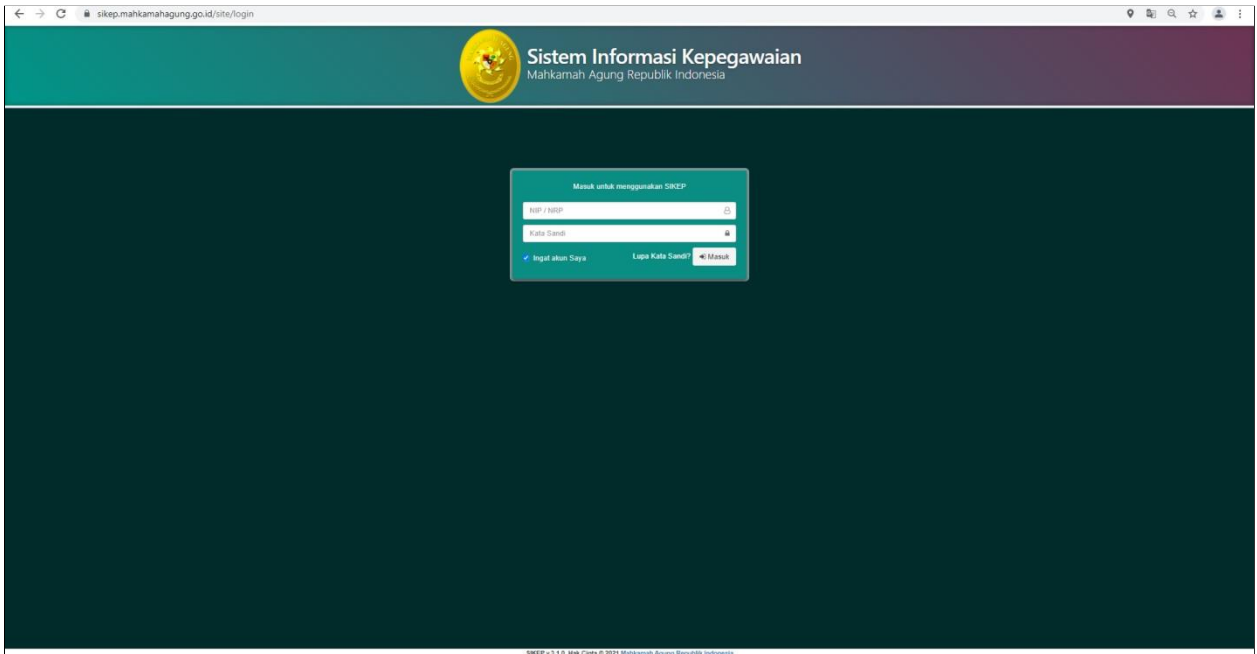
Copyright © 2021 DSP DJA KEMENKEU



Aplikasi yang digunakan sebagai pengukuran kinerja anggaran satuan kerja

Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMART) merupakan aplikasi yang dikembangkan DJKN yang mengusung perubahan proses bisnis dan kegiatan rutin di lingkungan kerja DJKN menuju era digitalisasi, *less-paper*, dan otomatis.

## J. Aplikasi SIKEP

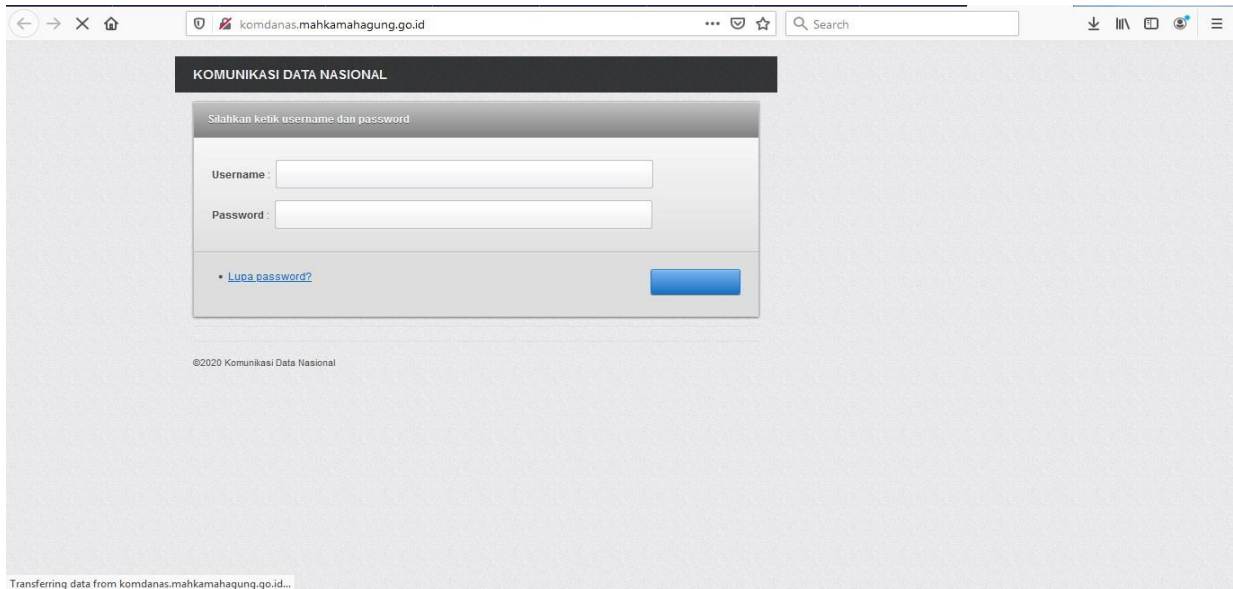


Sikep adalah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang menyajikan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

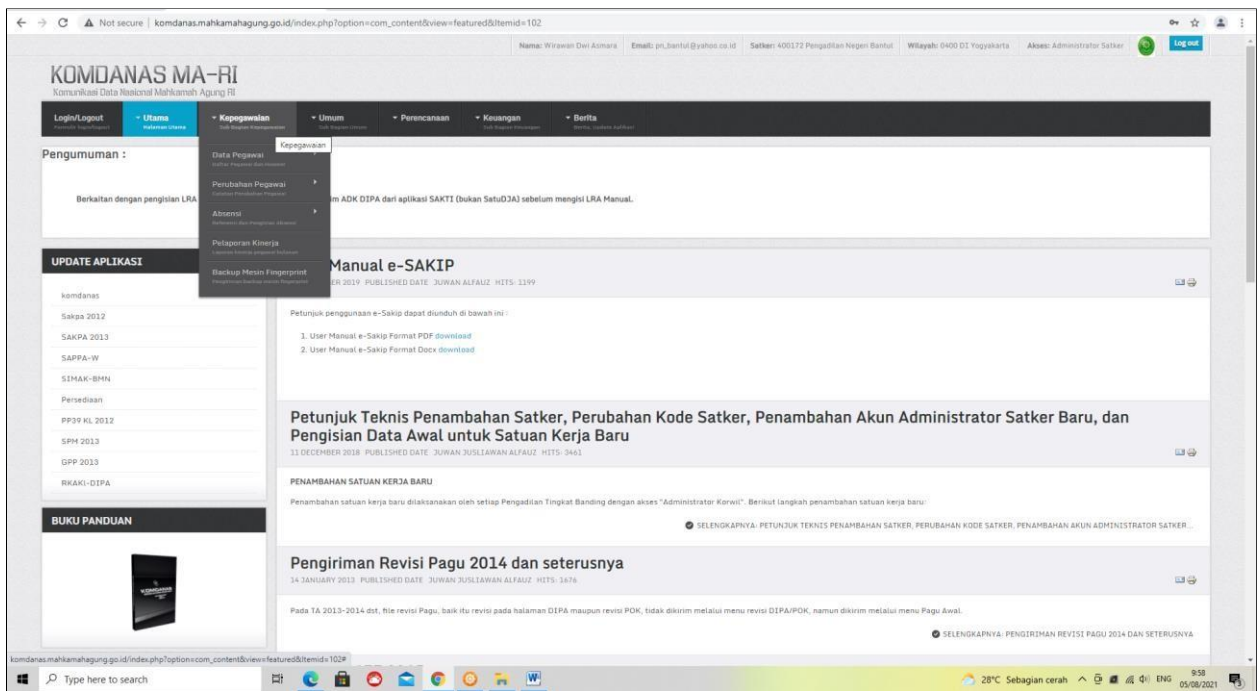
Sikep berisi data Seluruh Aparatur Mahkamah Agung RI, data pokok, Riwayat Pekerjaan, Pendidikan Formal/ Informal, Riwayat Diklat, Penilaian dan lain – lain.

Fungsi lain dari SIKEP pada masa Pandemi Covid ini adalah Presensi Online berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020.

## K. Aplikasi KOMDANAS (Kepegawaian)



Transferring data from komdanas.mahkamahagung.go.id...



Tabel di bawah menampilkan daftar absensi.

- adalah absensi tanpa potongan
- adalah absensi dengan potongan pada saat datang atau pulang
- adalah absensi dengan potongan satu hari penuh
- adalah hari libur atau hari tanpa absensi
- x adalah absensi yang belum diisi

[Download Daftar Absensi bulan Juni tahun 2020](#)

[Isi absensi dengan data tepat waktu](#)

Tampilkan :  
2020 Juni Tanggal 1 s.d 10

#	Kode Wilayah / Kode Satker aktif	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	1 Senin	2 Selasa	3 Rabu	4 Kamis	5 Jumat	6 Sabtu	7 Minggu	8 Senin	9 Selasa	10 Rabu
1.	0400 DI Yogyakarta 400172 PH Bantul	ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H. MH 196711291992121001	Hakim Madya Utama IV/c	Ketua IB	ib	x	x	x	x	w	w	x	x	x
2.	0400 DI Yogyakarta 400172 PH Bantul	RHO IDRUMAH PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H. 197508161999031003	Hakim Madya Muda IV/b	Hakim	ib	x	x	x	x	w	w	x	x	x
3.	0400 DI Yogyakarta 400172 PH Bantul	DEWI KURNIASARI, S.H. 197812222001122001	Hakim Madya Pratama IV/a	Hakim	ib	x	x	x	x	w	w	x	x	x
4.	0400 DI Yogyakarta 400172 PH Bantul	SRI WIJAYANTI T. SH 197703192002122003	Hakim Madya Pratama	Hakim	ib	x	x	x	x	w	w	x	x	x

Komunikasi Data Nasional pada Kepegawaian berisi daftar hadir Seluruh Pegawai Dalam satu Satuan Kerja. Yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan untuk remunerasi bagi pegawai dan biaya transportasi bagi Hakim.